

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek hukum yang berlaku. Kemajuan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan maraknya penggunaan media elektronik mulai dari penggunaan *handphone* hingga komputer yang semakin canggih. Penggunaan media elektronik yang menyangkut teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan atau menyebarkan informasi merupakan hal yang sudah lazim dilakukan seseorang di zaman modern ini.

Kemajuan teknologi menyebabkan kemudahan seseorang untuk dapat mengakses apa saja yang dibutuhkan baik mengenai informasi, transaksi, dan banyak hal lagi lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi telah banyak mengubah perilaku manusia. Perkembangan penggunaan alat komunikasi secara elektronik memiliki keuntungan antara lain efisiensi, kecepatan dan kemudahan dalam melakukan kegiatan, namun muncul kekhawatiran ketika alat komunikasi secara elektronik akan disalahgunakan untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Untuk mengatasi penyalahgunaan penggunaan media elektronik, pendekatan hukum sangat diperlukan guna memperoleh kepastian hukum. Pendekatan hukum juga diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan bukti elektronik, antara lain pencemaran nama baik, pembunuhan yang terekam CCTV, penipuan dalam transaksi bisnis.

Untuk menyelesaikan kasus dengan media elektronik aparat penegak hukum masih sering menghadapi permasalahan dalam pembuktian. Permasalahan dalam pembuktian ini terjadi karena pembuktian menggunakan bukti elektronik pada persidangan perkara pidana umum masih menjadi hal yang diperdebatkan mengenai keabsahannya. Sebagaimana dapat kita ketahui bahwa mengenai informasi elektronik merupakan hal baru dalam hukum pidana di Indonesia. Dalam hukum acara pidana di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak mengenal informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Dalam tulisan ini pembahasan dibatasi hanya pada kekuatan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana umum. Sistem pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), alat bukti yang ada belum memuat mengenai alat bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 184 KUHP jenis alat bukti ada lima yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Kenyataan saat ini banyak sekali muncul kejahatan yang berkaitan dengan dunia maya yang menggunakan bukti elektronik untuk mengungkap proses pembuktian perkara pidana. Guna mengantisipasi meningkatnya tindak pidana dengan menggunakan informasi dan elektronik, pada tahun 2008 telah diterbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keberadaan Undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap alat bukti elektronik.

Pembuktian pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri bersifat *Lex Specialis* dari

KUHAP karena mengatur keberlakuan pembuktian tindak pidana di dunia maya. Berkaitan dengan tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil maka proses pembuktian merupakan suatu tahap yang sangat menentukan bagi hakim untuk memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan putusan. Mengacu pada kelima alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka munculah suatu pertanyaan masuk kelompok manakah alat bukti elektronik itu. Mengingat surat elektronik dan dokumen elektronik pada intinya merupakan data yang dituangkan dalam bentuk elektronik yang belum diatur dalam KUHAP, maka untuk menentukan apakah surat elektronik dan dokumen elektronik masuk ke dalam kategori alat bukti berupa surat merupakan suatu hal yang tidak mudah.

Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijke*, yaitu hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut Undang-undang dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bersalah atau tidaknya terdakwa. Hakim tidak boleh menggunakan alat bukti selain yang diatur dalam Undang-undang.

Dewasa ini informasi elektronik telah dapat dijadikan sebagai alat bukti pada kasus-kasus yang bersifat khusus, sebagaimana Undang-undang telah mengaturnya sebagai alat bukti yang sah seperti dalam kasus tindak pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui pada Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999) yang dalam Pasal 26 A menyatakan bahwa ‘alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

1. alat bukti lain berupa informasi lain yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa.
2. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas.

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur tentang alat bukti yang berupa informasi elektronik sebagai berikut ‘dokumen adalah data rekaman yang dapat dilihat, dibaca, didengar dan dikeluarkan dan atau dengan bantuan sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. tulisan, suara, atau gambar
2. peta, rancangan, foto,
3. huruf, tanda, angka, simbol, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan

Pemerintah Pengganti Undang-undang yang pada Pasal 27 menyebutkan bahwa alat bukti pemeriksaan terorisme meliputi :

1. alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP
2. alat bukti lain berupa informasi lain yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat bukti atau yang serupa dengan itu
3. data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik selain kertas, yang terekam secara elektronik tetapi tidak terbatas pada 1. Tulisan, suara, atau gambar; 2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya 3. Huruf, tanda, angka, simbol yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selanjutnya data elektronik sebagai alat bukti dapat juga ditemukan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepabeaan.

Kebutuhan terhadap bukti elektronik dalam peradilan tindak pidana umum telah diakomodasi dalam RUU Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada draft bulan Desember Tahun 2012 mengenai bukti elektronik sebagai alat bukti (Pasal 175) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah mencakup :

1. barang bukti
2. surat-surat;

3. bukti elektronik;
4. keterangan seorang ahli;
5. keterangan seorang saksi;
6. keterangan terdakwa;
7. pengamatan hakim

Pengertian alat bukti elektronik menurut Pasal 175 RUU KUHAP adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka yang memiliki makna.

Hukum acara pidana Indonesia dewasa ini mengenal alat bukti informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah masih terbatas untuk tindak pidana khusus seperti yang diuraikan diatas seperti korupsi, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana keabean. Untuk tindak pidana umum masih menjadi pro dan kontra karena didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana alat bukti elektronik tidak dikenal sebagai alat bukti yang sah.

Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang keabsahan bukti elektronik pada pembuktian persidangan perkara pidana umum tentu

menjadi permasalahan yang dihadapi aparat penegak hukum saat ini. Dalam menggunakan bukti elektronik pada pembuktian peridangan perkara pidana umum tentu akan menyebabkan terjadi pro dan kontra mengenai apa saja yang termasuk bukti elektronik, apa syarat bagi bukti elektronik hingga dapat dijamin keasliannya, dan tentu saja bagaimana kekuatan pembuktian bukti elektronik.

Bertolak dari latar belakang pemikiran diatas maka penulis dalam penulisan hukum ini mengambil judul tentang Kekuatan Pembuktian Bukti Elektronik Dalam Persidangan Perkara Pidana Umum.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut dapat disimpulkan Perumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi hukum untuk mempertimbangkan bukti elektronik dalam proses peradilan perkara pidana umum?
2. Bagaimana kekuatan bukti elektronik pada peradilan pidana umum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah yang dikemukakan, maka Tujuan Penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data guna mengetahui dan menjelaskan interpretasi hukum bukti elektronik pada persidangan perkara pidana umum.
2. Untuk mendapatkan data dan menjelaskan kekuatan bukti elektronik pada pembuktian persidangan perkara pidana umum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya perkembangan hukum acara pidana dalam proses pembuktian pada persidangan perkara pidana umum.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan dan membuat peraturan-peraturan yang terkait dengan Kekuatan Bukti Elektronik pada proses persidangan perkara pidana umum.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai bahan agar pertimbangan agar dapat menggunakan Alat Bukti Elektronik sebagai alat bukti yang sah pada proses persidangan perkara pidana umum dengan syarat dapat dijamin keaslian dari Bukti Elektronik tersebut.

c. Bagi Peneliti

Penelitian hukum tentang Kekuatan Pembuktian Bukti Elektronik diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti mengenai Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik pada persidangan perkara pidana umum. Manfaat berikutnya adalah diharapkan penulis dapat mengetahui secara jelas apa kendala yang dihadapi sehingga belum ada perundang-undangan yang mengatur Kekuatan Bukti Elektronik pada persidangan perkara pidana umum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan hasil karya peneliti dengan judul “Kekuatan Pembuktian Bukti Elektronik Dalam Persidangan Perkara Pidana Umum” dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari karya peneliti yang lain.

Hal yang membedakan dengan karya penelitian lain yang pernah dilakukan adalah:

1. Mukhlis, NPM 07360013 dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan penelitian pada Tahun 2001.

a. Judul: Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia.

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam pembuktian di dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia?
- 2) Bagaimana komparasi mengenai kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam pembuktian di dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menjelaskan bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian di dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia.
- 2) Untuk melakukan telaah komparatif mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian di dalam hukum Islam dan hukum

pidana Indonesia, terutama aspek persamaan dan perbedaan dalam pembuktian kedua hukum tersebut.

d. Hasil Penelitian

1) Alat bukti elektronik di dalam hukum Islam dan hukum pidana di

Indonesia merupakan alat bukti yang sah di dalam Pengadilan. Di dalam hukum Islam kedudukan alat bukti elektronik dilihat berdasarkan metode *qiyās* (analogi), alat bukti elektronik *diiqiyās* kepada alat bukti pendapat ahli, *qarināh* dan tulisan. Dengan persamaan *'illat* berupa “fungsi” dari keduanya. Yaitu dapat sama-sama dapat memberikan kejelasan tentang suatu perkara sehingga dapat menimbulkan keyakinan pada hakim. Dengan demikian kedudukan alat bukti elektronik pada hukum Islam merupakan alat bukti yang sah. Dalam hukum pidana Indonesia sendiri, kedudukan alat bukti telah diatur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 5 ayat (1) dan (2).

2) Persamaan dan perbedaan alat bukti elektronik dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia:

a) Persamaan

- i. Hukum Islam dan hukum pidana Indonesia merupakan tatanan hukum yang dinamis.
- ii. Dari segi keabsahan, alat bukti elektronik sah sebagai alat bukti pada hukum Islam dan hukum pidana Indonesia.

iii. Alat bukti elektronik baik di hukum Islam maupun di hukum pidana Indonesia, tidak bisa dipisahkan lagi dengan pendapat ahli. Alasannya adalah karena kerumitan dalam memahami sehingga dapat dipastikan bahwa aparat hukum masih buta dengan itu.

b) Perbedaan

- I. Hukum Islam dan Hukum Indonesia berbeda dalam menganut sistem pembuktian.
- II. Titik tekan perbedaan antara hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia mengenai alat bukti elektronik adalah pijakan dasar dalam penerapan hukum. Di dalam hukum Islam berdasarkan metode *qiyās*, sedangkan di dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan undang-undang.
- III. Dari segi kekuatan alat bukti elektronik di dalam pembuktian, hukum Islam berbeda dengan hukum pidana Indonesia karena perbedaan sistem pembuktian yang dianut. Hukum Islam menganut sistem pembuktian menurut undang-undang positif, sedangkan hukum pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

2. Aditya Galih Oktana, NPM 040508832 dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah melakukan penelitian pada tahun 2010.

a. Judul

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

b. Rumusan Masalah

- 1) Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan proses pembuktian dalam tindak pidana *Cyber Crime* yang dapat dilakukan oleh perangkat hukum di Indonesia?
- 2) Kendala-kendala yuridis apa saja yang dihadapi oleh perangkat hukum di Indonesia untuk menangani para pelaku Kejahatan dunia maya terkait dengan masalah *Cyber crime*

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui, apakah hukum positif di Indonesia sudah mampu untuk menjerat para pelaku Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*), karena sebenarnya Kejahatan Dunia Maya telah memenuhi unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam Hukum Positif di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui kendala yuridis apa saja yang dihadapi oleh pengadilan dalam menanggulangi *Cyber Crime*, serta kendala-kendala pengadilan dalam melakukan proses penyidikan terkait dengan pengumpulan alat bukti kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*).
- 3) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pengadilan dalam melakukan proses pembuktian pada para pelaku tindak pidana *Cyber Crime*, mengingat sulitnya proses pemidanaan terkait dengan sedikitnya alat bukti dalam tindak pidana tersebut.

d. Hasil Penelitian

1) Upaya-upaya yang dilakukan dalam pembuktian tindak pidana di dunia maya adalah :

- i. Dalam rangka mengungkap tindak pidana dunia maya, penyidik POLRI dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- ii. Menggunakan keterangan atau pendapat para ahli telematika yang mempunyai keahlian di bidangnya, dengan keterangan yang didapat tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti yang ada.
- iii. Dengan mengumpulkan dan mengamankan barang bukti digital untuk analisa lebih lanjut agar dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.
- iv. Dengan melakukan pendekatan teknologi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat, supaya dalam menangani kasus tindak pidana dunia maya tidak gagap teknologi dan dapat menyelesaikannya dengan pendekatan teknologi.

2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana dunia maya adalah :

- i. Kelemahan lain ada pada perangkat digital forensik (lab komputer forensik mabas POLRI) yang belum dimiliki secara

menyeluruh oleh POLRI di setiap daerah, mengingat penting keberadaannya dalam mencegah, maupun menangani kasus-kasus yang berkaitan dalam *Cyber Crime*.

- ii. Kejahatan dunia maya ini sering melibatkan antar negara (*transnasional*) dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dan diluar yuridiksi hukum Indonesia, dalam hal ini POLISI atau interpol kesulitan dalam melakukan penindakan dan pemeriksaan terhadap pelaku/operator yang sangat cerdas dalam menjalankan setiap modus kejahatannya.
- iii. Masih kurangnya sumber daya manusia dalam hal pengetahuannya tentang teknologi digital, kode-kode digital ditingkat POLRI, jaksa, hakim, sehingga dalam menangani tindak pidana dunia maya mengalami hambatan dalam pembuktian.
- iv. Masih lemahnya peraturan Undang-undang yang mengatur tindak pidana di dunia maya, dan faktor ini yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana dunia maya untuk mencari celah-celah hukum agar lolos dari jerat hukum.

F. Batasan Konsep

1. Pembuktian: Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa.¹

¹ M, Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini Penerbit Buku Bermutu P.T Sarana Bakti Semesta, 1985, hlm 797.

2. Bukti Elektronik:

Bukti elektronik merupakan dokumen yang tersimpan dalam komputer atau alat elektronik lainnya.

3. Perkara Pidana Umum:

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), bukan yang diatur dalam Undang-undang Pidana Khusus dan Pidana Administrasi.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan penulis ini merupakan penelitian secara normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dilakukan/berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

1. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri dari:

a. Data sekunder adalah terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer : berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :
 - a) KUHP
 - b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

- d) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
 - e) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.
 - g) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Kepabeanan yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2005.
- b. Bahan hukum sekunder: berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, naskah RUU KUHAP, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, dan internet.

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari materi yang akan dikaji, diklasifikasikan dan dipaparkan.

- b. Wawancara dengan narasumber yaitu hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bernama Putut Setiyanto, SH. Lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilakukan dengan cara wawancara untuk mengkaji pendapat umum.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukum).
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

4. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3(tiga) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I yang berisi Pendahuluan ini penulis akan menulis mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

BAB II : BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA UMUM

Dalam BAB II berisi Pembahasan tentang kekuatan Bukti Elektronik dalam perkara pidana umum. Dalam BAB II ini penulis akan menguraikan lagi sub-sub bab pembahasan yang terdiri dari sub bab pertama yang menjelaskan sistem pembuktian dalam perkara pidana umum. Sub bab kedua memberikan penjelasan tentang pengertian bukti elektronik, macam bukti elektronik, perumusan bukti elektronik dalam berbagai hukum pidana positif di Indonesia dan masalah teknis pembuktian terhadap bukti elektronik. Sub bab ketiga berisi penjelasan tentang pendekatan interpretasi terhadap ketentuan alat bukti yang sah dalam KUHAP dan penerapan bukti elektronik dalam kasus tindak pidana umum. Dalam sub bab keempat akan memberikan penjelasan tentang syarat dan prosedur bukti elektronik yang dapat diajukan dalam proses pembuktian tindak pidana umum dan teknis penilaian terhadap kekuatan bukti elektronik dalam perkara tindak pidana umum.

BAB III : PENUTUP

Dalam BAB III Penulis akan menulis mengenai Kesimpulan dan Saran mengenai pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan Penulis.